SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

2. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintah menjadi kewenangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PDPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharan Umum Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
14. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

(1) ADD Tahun Anggaran 2024 adalah dana yang bersumber dari 10% (sepuluh persen) dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi DAK yang merupakan bagian dari bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
(3) ADD dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.
(4) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang merupakan bagian APBDesa.
(5) ADD dialokasikan sebagaimana dimaksud ayat (3) berjumlah Rp.92.307.586.900,- (Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN

ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

(1) ADD dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.
(2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja ADD dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGALOKASIAN

ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (Sepuluh Persen) total dana perimbangan Kabupaten setelah dikurangi DAK.

(2) ADD sebagimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 122 (seratus dua puluh dua) Desa di Kabupaten dengan mempertimbangkan :
   a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
   b. jumlah penduduk Desa;
   c. luas wilayah Desa;
   d. angka kemiskinan Desa; dan
   e. tingkat kesulitan geografis Desa.

(3) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kependudukan dan bidang statistik.

(1) Perhitungan Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perhitungan dan penetapan besaran ADD setiap Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Nilai ADD setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang harus dimasukkan didalam Dokumen APBDesa.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 7

(1) Mekanisme Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum, Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2) Penyaluran ADD dilakukan tiga tahap dari alokasi setiap Desa dengan ketentuan :
   a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke- 3 bulan Juni;
   b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Agustus; dan
   c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan September.

Pasal 8

Persyaratan Pencairan ADD sebagai berikut :

1. Untuk Tahap I dapat diajukan dengan melampirkan yaitu :
   a. surat pengantar dari Kecamatan;
   b. peraturan Desa tentang APBDesa;
   c. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
   d. peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
   e. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa 2023 disertai dengan :
      1) laporan keuangan, terdiri atas:
         a. laporan realisasi APBDesa; dan
         b. catatan atas laporan keuangan.
      2) laporan realisasi kegiatan; dan
      3) daftar program sektoral, program Daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa .
   f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 yang terdiri dari:
      1) rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
      2) rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
      3) rencana Anggaran Biaya ;
   g. peraturan Desa tentang Penyertaan Modal jika tersedia;
   h. berita Acara hasil musyawarah BPD;
   i. berita acara hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD;
   j. keputusan Camat tentang Hasil evaluasi APBDesa;
   k. laporan dokumentasi pekerjaan fisik (Foto 0,50 % dan 100 %) dan pengadaan asset Tahun 2023;
   l. laporan entri Data Profil Desa Tahun 2023 yang berisi Data Pokok Tahunan, laporan Potensi dan Perkembangan dan entri Data Epdeskel 2023;
   m. data Aset Desa melalui Aplikasi SIPADES 2023; dan
   n. data Perkembangan BUMDes 2023.
2. Untuk Tahap II, dapat diajukan dengan melampirkan yaitu :
   a. laporan realisasi Tahap I sudah mencapai 35 % (tiga puluh lima persen);
   b. realisasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan setiap Desa telah mencapai 50 % (lima puluh persen);
   c. bukti pembayaran Pajak Negara;
   d. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   e. surat bebas temuan di Inspektorat.
3. Untuk Tahap III, dapat diajukan melampirkan yaitu :

a. laporan realisasi Tahap II sudah mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen);
b. realisasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan setiap Desa telah mencapai 85 % (delapan puluh lima persen); dan
c. entri data profil Desa dan kapital Tahun 2024 sudah mencapai 80 % (delapan puluh persen).

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
ALOKASI DANA DESA
Pasal 9

(1) Pelaksanaan Anggaran ADD melalui belanja transfer didasarkan pada APBDesa.
(2) Anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Dokumen APBDesa setiap tahun anggaran.
(3) APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 10

(1) Pencairan ADD terintegrasi dengan pencairan APBDesa.
(2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD.
(3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
    a. nomor rekening bank Pemerintah Desa yang menerima ADD;
    b. pakta integritas; dan
    c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
(4) Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan, pertahapan dan atau total pagu per 12 (dua belas) dari nilai pagu per Desa.
(1) Format pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 11

(1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

(2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan rincian sebagai berikut :
   a. asli untuk arsip Pemerintah Desa;
   b. 1 (satu) rangkap fotokopi untuk Kecamatan;
   c. 1 (satu) rangkap fotokopi untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
   d. 1 (satu) rangkap fotokopi untuk Inspektorat Daerah.
(3) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan ADD yang diterimanya.
(4) Pemerintah Desa menyempaikan pertanggungjawaban ADD paling lambat bulan Maret Tahun 2024.

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian ADD kepada Pemerintah Desa meliputi:
a. dokumen APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; dan
b. bukti SP2D, bukti transfer uang dan kwitansi bukti penerimaan uang.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD.
(2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Kabupaten.
(4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya didalam APBDesa, Pemerintah Daerah dapat menunda dan/atau menahan pencairan tahap berikutnya sampai dengan diselesaikannya hasil temuan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 19 NOMOR 2023

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP.19780121 200604 2 027

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BOBOT FORMULASI DAN TATA CARA PERHITUNGAN

1. Bobot formulasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jumlah penduduk, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis, angka kemiskinan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
    a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
    b. 40% (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
    c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
    d. 40% (empat puluh lima persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis Desa.

2. Penghitungan alokasi formula setiap Desa dihitung menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = (0{,}10 * Z1) + (0{,}40 * Z2) + (0{,}10 * Z3) + (0{,}40 * Z4)$$

Keterangan:
W = Dana Desa setiap Desa.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk Desa.
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap penduduk terhadap luas wilayah Desa.
Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG Desa.

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

A. ADD Berdasarkan Formula

NO	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA TIAP DESA			
		ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA	NOMOR REKENING
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)= (3) + (4)*	
I	**KECAMATAN PETASIA**				
1	GANDA-GANDA	680.957.608	118.748.818	799.706.426	401.02.02.01528-1
2	KOYA	680.957.608	79.529.945	760.487.553	401.02.02.01533-3
3	GILILANA	680.957.608	75.638.992	756.596.600	401.02.02.01529-2
4	TANAUGE	680.957.608	80.116.819	761.074.427	401.02.02.01539-5
5	KOROLOLAKI	680.957.608	78.365.538	759.323.146	401.02.02.01592-1
6	KOROLOLAMA	680.957.608	87.639.575	768.597.183	401.02.02.01563-2
7	KOROMATANTU	680.957.608	82.340.378	763.297.986	401.02.02.01532-0
II	**KECAMATAN PETASIA TIMUR**				
1	BUNTA	680.957.608	440.754.601	1.121.712.209	401.02.02.01525-4
2	TOMPIRA	680.957.608	172.738.324	853.695.932	401.02.02.01605-2
3	BUNGINTIMBE	680.957.608	229.087.843	910.045.451	401.02.02.01524-2
4	TOWARA	680.957.608	97.691.152	778.648.760	401.02.02.01550-3
5	MOLINO	680.957.608	87.029.816	767.987.424	401.02.02.01572-3
6	MOHONI	680.957.608	77.798.868	758.756.476	401.02.02.01538-3

7	UNGKEA	680.957.608	77.876.708	758.834.316	401.02.02.01544-8
8	BIMOR JAYA	680.957.608	74.029.506	754.987.114	401.02.02.01522-8
9	MOLORES	680.957.608	74.067.306	755.024.914	401.02.02.01540-1
10	KEUNO	680.957.608	54.179.753	735.137.361	401.02.02.01531-9
11	TOWARA PANTAI	680.957.608	45.471.957	726.429.565	401.02.02.01620-8
12	PEBOA	680.957.608	58.912.532	739.870.140	401.02.02.01616-7
III	**KECAMATAN LEMBO RAYA**				
1	DOLUPO KARYA	680.957.608	99.816.492	780.774.100	401.02.02.01526-6
2	PO'ONA	680.957.608	45.943.295	726.900.903	401.02.02.01637-5
3	PETUMBEA	680.957.608	53.971.275	734.928.883	401.02.02.01543-6
4	RONTA	680.957.608	55.407.229	736.364.837	401.02.02.01638-7
5	PONTANGOA	680.957.608	57.355.744	738.313.352	401.02.02.01636-3
6	JAMOR JAYA	680.957.608	73.104.246	754.061.854	401.02.02.01624-6
7	PA'AWARU	680.957.608	57.454.699	738.412.307	401.02.02.01635-0
8	LEMBOBELALA	680.957.608	47.683.630	728.641.238	401.02.02.01631-3
9	BINTANGOR MUKTI	680.957.608	59.367.380	740.324.988	401.02.02.01523-1
10	MANDULA	680.957.608	64.494.540	745.452.148	401.02.02.01633-7
IV	**KECAMATAN LEMBO**				
1	BETELEME	680.957.608	118.526.158	799.483.766	401.02.02.01623-4
2	ULUANSO	680.957.608	42.871.901	723.829.509	401.02.02.01641-6
3	MORA	680.957.608	40.552.971	721.510.579	401.02.02.01634-9
4	WARAA	680.957.608	52.991.830	733.949.438	401.02.02.01641-6
5	TINGKEAO	680.957.608	54.067.929	735.025.537	401.02.02.01639-9
6	WAWOPADA	680.957.608	57.539.478	738.497.086	401.02.02.01643-1
7	KOROWALELO	680.957.608	63.712.206	744.669.814	401.02.02.01627-2
8	TINOMPO	680.957.608	82.005.307	762.962.915	401.02.02.01640-4
9	KUMPI	680.957.608	43.468.996	724.426.604	401.02.02.01629-6
10	KOROMPEELI	680.957.608	53.118.565	734.076.173	401.02.02.01626-1
11	LEMBOROMA	680.957.608	58.074.401	739.032.009	401.02.02.01632-5

12	KOROWOU	680.957.608	130.048.827	811.006.435	401.02.02.01628-4
13	LEMBOBARU	680.957.608	47.047.917	728.005.525	401.02.02.01630-0
14	KOROBONDE	680.957.608	62.253.758	743.211.366	401.02.02.01625-8
V	**KECAMATAN MORI ATAS**				
1	TOMATA	680.957.608	59.576.681	740.534.289	401.02.02.01604-1
2	LONDI	680.957.608	73.502.374	754.459.982	401.02.02.01567-1
3	TAENDE	680.957.608	87.801.170	768.758.778	401.02.02.01587-6
4	ENSA	680.957.608	57.784.247	738.741.855	401.02.02.01555-3
5	KOLAKA	680.957.608	51.943.606	732.901.214	401.02.02.01559-0
6	PEONEA	680.957.608	89.148.302	770.105.910	401.02.02.01542-4
7	LANUMOR	680.957.608	63.063.415	744.021.023	401.02.02.01534-5
8	GONTARA	680.957.608	43.830.817	724.788.425	401.02.02.01557-7
9	LEE	680.957.608	46.970.559	727.928.167	401.02.02.01535-7
10	SAEMBA	680.957.608	72.151.759	753.109.367	401.02.02.01545-1
11	KASINGOLI	680.957.608	58.323.557	739.281.165	401.02.02.01530-7
12	TOMUI KARYA	680.957.608	49.466.938	730.424.546	401.02.02.01606-4
13	SAEMBA WALATI	680.957.608	44.349.793	725.307.401	401.02.02.01617-9
14	PAMBAREA	680.957.608	53.925.376	734.882.984	401.02.02.01614-3
VI	**KECAMATAN MORI UTARA**				
1	ERA	680.957.608	84.102.494	765.060.102	401.02.02.01527-8
2	PELERU	680.957.608	91.077.389	772.034.997	401.02.02.01578-5
3	TAMONJENGI	680.957.608	62.618.568	743.576.176	401.02.02.01546-2
4	MAYUMBA	680.957.608	60.240.759	741.198.367	401.02.02.01516-3
5	TIWA'A	680.957.608	45.348.793	726.306.401	401.02.02.01560-6
6	LEMBONTONARA	680.957.608	95.591.631	776.549.239	401.02.02.01536-9
7	TABARANO	680.957.608	48.579.570	729.537.178	401.02.02.01586-4
8	WAWONDULA	680.957.608	79.037.266	759.994.874	401.02.02.01551-5
VII	**KECAMATAN SOYO JAYA**				
1	LEMBAH SUMARA	680.957.608	60.443.425	741.401.033	401.02.02.01564-4

2	SUMARA JAYA	680.957.608	48.215.684	729.173.292	401.02.02.01585-2
3	TAMBAYOLI	680.957.608	81.562.744	762.520.352	401.02.02.01591-7
4	MALINO	680.957.608	53.407.170	734.364.778	401.02.02.01572-3
5	PANCA MAKMUR	680.957.608	83.555.162	764.512.770	401.02.02.01575-9
6	TAMAINUSI	680.957.608	84.696.477	765.654.085	401.02.02.01588-8
7	BAU	680.957.608	74.552.330	755.509.938	401.02.02.01553-9
8	MALINO JAYA	680.957.608	68.037.568	748.995.176	401.02.02.01569-4
9	TODDOPOLI UEBANGKE	680.957.608	53.319.016	734.276.624	401.02.02.01619-3
10	TANDOYONDO	680.957.608	61.534.722	742.492.330	401.02.02.01596-7
VIII	**KECAMATAN BUNGKU UTARA**				
1	BATURUBE	680.957.608	73.675.370	754.632.978	401.02.02.01552-7
2	POSANGKE	680.957.608	103.550.171	784.507.779	401.02.02.01579-7
3	TARONGGO	680.957.608	99.757.898	780.715.506	401.02.02.01597-9
4	UERURU	680.957.608	46.167.752	727.125.360	401.02.02.01610-5
5	UEWAJO	680.957.608	80.284.940	761.242.548	401.02.02.01609-1
6	TIRONGAN BAWAH	680.957.608	59.614.393	740.572.001	401.02.02.01598-0
7	TIRONGAN ATAS	680.957.608	81.107.741	762.065.349	401.02.02.01601-4
8	SILITI	680.957.608	70.452.348	751.409.956	401.02.02.01584-1
9	LEMO	680.957.608	61.876.151	742.833.759	401.02.02.01565-6
10	SALUBIRO	680.957.608	151.801.176	832.758.784	401.02.02.01582-6
11	UEMASI	680.957.608	71.431.043	752.388.651	401.02.02.01607-6
12	OPO	680.957.608	81.228.314	762.185.922	401.02.02.01600-2
13	TANAKURAYA	680.957.608	66.275.703	747.233.311	401.02.02.01592-9
14	TAMBAROBONE	680.957.608	63.163.407	744.121.015	401.02.02.01590-5
15	WOOMPARIGI	680.957.608	59.047.192	740.004.800	401.02.02.01612-9
16	BOBA	680.957.608	59.493.636	740.451.244	401.02.02.01554-0
17	KALOMBANG	680.957.608	65.052.014	746.009.622	401.02.02.01558-9
18	TOKONANAKA	680.957.608	65.949.323	746.906.931	401.02.02.01603-8
19	MATUBE	680.957.608	68.739.798	749.697.406	401.02.02.01570-9

20	LEMOWALIA	680.957.608	77.503.359	758.460.967	401.02.02.01613-0
21	UEMPANAPA	680.957.608	69.351.458	750.309.066	401.02.02.01621-1
22	TOKALA ATAS	680.957.608	95.345.042	776.302.650	401.02.02.01602-6
23	POKEANG	680.957.608	69.315.628	750.273.236	401.02.02.01615-5
IX	**KECAMATAN MAMOSALATO**				
1	PANDAUKE	680.957.608	100.686.222	781.643.830	401.02.02.01576-0
2	KOLO BAWAH	680.957.608	88.956.500	769.914.108	401.02.02.01599-3
3	KOLO ATAS	680.957.608	77.673.022	758.630.630	401.02.02.01561-8
4	MOMO	680.957.608	71.199.632	752.157.240	401.02.02.01573-5
5	TANANAGAYA	680.957.608	66.259.096	747.216.704	401.02.02.01593-0
6	UEPAKATU	680.957.608	74.064.279	755.021.887	401.02.02.01608-8
7	LIJO	680.957.608	65.135.841	746.093.449	401.02.02.01566-8
8	TANASUMPU	680.957.608	88.925.805	769.883.413	401.02.02.01594-3
9	PARANGISI	680.957.608	70.259.180	751.216.788	401.02.02.01577-3
10	GIRIMULYA	680.957.608	53.228.442	734.186.050	401.02.02.01556-5
11	WINANGOBINO	680.957.608	102.278.688	783.236.296	401.02.02.01611-7
12	TAMBALE	680.957.608	57.883.802	738.841.410	401.02.02.01589-1
13	SEA	680.957.608	98.264.890	779.222.498	401.02.02.01583-8
14	MENYO'E	680.957.608	111.972.571	792.930.179	401.02.02.01571-0
X	**KECAMATAN PETASIA BARAT**				
1	TIU	680.957.608	83.017.036	763.974.644	401.02.02.01547-4
2	TONTOWEA	680.957.608	78.030.875	758.988.483	401.02.02.01549-8
3	TOGO MULYO	680.957.608	75.986.451	756.944.059	401.02.02.01548-6
4	MARALEE	680.957.608	55.057.978	736.015.586	401.02.02.01537-0
5	MONDOWE	680.957.608	69.108.616	750.066.224	401.02.02.01541-2
6	SAMPALOWO	680.957.608	57.124.319	738.081.927	401.02.02.01581-4
7	MOLEONO	680.957.608	67.289.483	748.247.091	401.02.02.01539-5
8	ONEPUTE	680.957.608	69.803.527	750.761.135	401.02.02.01574-7

9	ULU LAA	680.957.608	57.685.919	738.643.527	401.02.02.01622-2
10	TADAKU JAYA	680.957.608	50.026.124	730.983.732	401.02.02.01618-0
Total		**83.076.828.176**	**9.230.758.724**	**92.307.586.900**	

B. ADD Berdasarkan Pertahapan

NO	NAMA DESA	PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA				
		ALOKASI DANA DESA	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%	NOMOR REKENING
I	**KECAMATAN PETASIA**					
1	GANDA-GANDA	799.706.426	319.882.570	319.882.570	159.941.285	401.02.02.01528-1
2	KOYA	760.487.553	304.195.021	304.195.021	152.097.511	401.02.02.01533-3
3	GILILANA	756.596.600	302.638.640	302.638.640	151.319.320	401.02.02.01529-2
4	TANAUGE	761.074.427	304.429.771	304.429.771	152.214.885	401.02.02.01539-5
5	KOROLOLAKI	759.323.146	303.729.258	303.729.258	151.864.629	401.02.02.01592-1
6	KOROLOLAMA	768.597.183	307.438.873	307.438.873	153.719.437	401.02.02.01563-2
7	KOROMATANTU	763.297.986	305.319.194	305.319.194	152.659.597	401.02.02.01532-0
II	**KECAMATAN PETASIA TIMUR**					
1	BUNTA	1.121.712.209	448.684.884	448.684.884	224.342.442	401.02.02.01525-4
2	TOMPIRA	853.695.932	341.478.373	341.478.373	170.739.186	401.02.02.01605-2
3	BUNGINTIMBE	910.045.451	364.018.180	364.018.180	182.009.090	401.02.02.01524-2
4	TOWARA	778.648.760	311.459.504	311.459.504	155.729.752	401.02.02.01550-3
5	MOLINO	767.987.424	307.194.970	307.194.970	153.597.485	401.02.02.01572-3
6	MOHONI	758.756.476	303.502.590	303.502.590	151.751.295	401.02.02.01538-3
7	UNGKEA	758.834.316	303.533.726	303.533.726	151.766.863	401.02.02.01544-8

8	BIMOR JAYA	754.987.114	301.994.845	301.994.845	150.997.423	401.02.02.01522-8
9	MOLORES	755.024.914	302.009.966	302.009.966	151.004.983	401.02.02.01540-1
10	KEUNO	735.137.361	294.054.944	294.054.944	147.027.472	401.02.02.01531-9
11	TOWARA PANTAI	726.429.565	290.571.826	290.571.826	145.285.913	401.02.02.01620-8
12	PEBOA	739.870.140	295.948.056	295.948.056	147.974.028	401.02.02.01616-7
III	**KECAMATAN LEMBO RAYA**					
1	DOLUPO KARYA	780.774.100	312.309.640	312.309.640	156.154.820	401.02.02.01526-6
2	PO'ONA	726.900.903	290.760.361	290.760.361	145.380.181	401.02.02.01637-5
3	PETUMBEA	734.928.883	293.971.553	293.971.553	146.985.777	401.02.02.01543-6
4	RONTA	736.364.837	294.545.935	294.545.935	147.272.967	401.02.02.01638-7
5	PONTANGOA	738.313.352	295.325.341	295.325.341	147.662.670	401.02.02.01636-3
6	JAMOR JAYA	754.061.854	301.624.742	301.624.742	150.812.371	401.02.02.01624-6
7	PA'AWARU	738.412.307	295.364.923	295.364.923	147.682.461	401.02.02.01635-0
8	LEMBOBELALA	728.641.238	291.456.495	291.456.495	145.728.248	401.02.02.01631-3
9	BINTANGOR MUKTI	740.324.988	296.129.995	296.129.995	148.064.998	401.02.02.01523-1
10	MANDULA	745.452.148	298.180.859	298.180.859	149.090.430	401.02.02.01633-7
IV	**KECAMATAN LEMBO**					
1	BETELEME	799.483.766	319.793.506	319.793.506	159.896.753	401.02.02.01623-4
2	ULUANSO	723.829.509	289.531.804	289.531.804	144.765.902	401.02.02.01641-6
3	MORA	721.510.579	288.604.232	288.604.232	144.302.116	401.02.02.01634-9
4	WARAA	733.949.438	293.579.775	293.579.775	146.789.888	401.02.02.01641-6
5	TINGKEAO	735.025.537	294.010.215	294.010.215	147.005.107	401.02.02.01639-9
6	WAWOPADA	738.497.086	295.398.834	295.398.834	147.699.417	401.02.02.01643-1
7	KOROWALELO	744.669.814	297.867.926	297.867.926	148.933.963	401.02.02.01627-2
8	TINOMPO	762.962.915	305.185.166	305.185.166	152.592.583	401.02.02.01640-4
9	KUMPI	724.426.604	289.770.642	289.770.642	144.885.321	401.02.02.01629-6
10	KOROMPEELI	734.076.173	293.630.469	293.630.469	146.815.235	401.02.02.01626-1

11	LEMBOROMA	739.032.009	295.612.804	295.612.804	147.806.402	401.02.02.01632-5
12	KOROWOU	811.006.435	324.402.574	324.402.574	162.201.287	401.02.02.01628-4
13	LEMBOBARU	728.005.525	291.202.210	291.202.210	145.601.105	401.02.02.01630-0
14	KOROBONDE	743.211.366	297.284.546	297.284.546	148.642.273	401.02.02.01625-8
V	**KECAMATAN MORI ATAS**					
1	TOMATA	740.534.289	296.213.716	296.213.716	148.106.858	401.02.02.01604-1
2	LONDI	754.459.982	301.783.993	301.783.993	150.891.996	401.02.02.01567-1
3	TAENDE	768.758.778	307.503.511	307.503.511	153.751.756	401.02.02.01587-6
4	ENSA	738.741.855	295.496.742	295.496.742	147.748.371	401.02.02.01555-3
5	KOLAKA	732.901.214	293.160.485	293.160.485	146.580.243	401.02.02.01559-0
6	PEONEA	770.105.910	308.042.364	308.042.364	154.021.182	401.02.02.01542-4
7	LANUMOR	744.021.023	297.608.409	297.608.409	148.804.205	401.02.02.01534-5
8	GONTARA	724.788.425	289.915.370	289.915.370	144.957.685	401.02.02.01557-7
9	LEE	727.928.167	291.171.267	291.171.267	145.585.633	401.02.02.01535-7
10	SAEMBA	753.109.367	301.243.747	301.243.747	150.621.873	401.02.02.01545-1
11	KASINGOLI	739.281.165	295.712.466	295.712.466	147.856.233	401.02.02.01530-7
12	TOMUI KARYA	730.424.546	292.169.818	292.169.818	146.084.909	401.02.02.01606-4
13	SAEMBA WALATI	725.307.401	290.122.961	290.122.961	145.061.480	401.02.02.01617-9
14	PAMBAREA	734.882.984	293.953.194	293.953.194	146.976.597	401.02.02.01614-3
VI	**KECAMATAN MORI UTARA**					
1	ERA	765.060.102	306.024.041	306.024.041	153.012.020	401.02.02.01527-8
2	PELERU	772.034.997	308.813.999	308.813.999	154.406.999	401.02.02.01578-5
3	TAMONJENGI	743.576.176	297.430.470	297.430.470	148.715.235	401.02.02.01546-2
4	MAYUMBA	741.198.367	296.479.347	296.479.347	148.239.673	401.02.02.01516-3
5	TIWA'A	726.306.401	290.522.560	290.522.560	145.261.280	401.02.02.01560-6
6	LEMBONTONARA	776.549.239	310.619.695	310.619.695	155.309.848	401.02.02.01536-9
7	TABARANO	729.537.178	291.814.871	291.814.871	145.907.436	401.02.02.01586-4

8	WAWONDULA	759.994.874	303.997.950	303.997.950	151.998.975	401.02.02.01551-5
VII	**KECAMATAN SOYO JAYA**					
1	LEMBAH SUMARA	741.401.033	296.560.413	296.560.413	148.280.207	401.02.02.01564-4
2	SUMARA JAYA	729.173.292	291.669.317	291.669.317	145.834.658	401.02.02.01585-2
3	TAMBAYOLI	762.520.352	305.008.141	305.008.141	152.504.070	401.02.02.01591-7
4	MALINO	734.364.778	293.745.911	293.745.911	146.872.956	401.02.02.01572-3
5	PANCA MAKMUR	764.512.770	305.805.108	305.805.108	152.902.554	401.02.02.01575-9
6	TAMAINUSI	765.654.085	306.261.634	306.261.634	153.130.817	401.02.02.01588-8
7	BAU	755.509.938	302.203.975	302.203.975	151.101.988	401.02.02.01553-9
8	MALINO JAYA	748.995.176	299.598.070	299.598.070	149.799.035	401.02.02.01569-4
9	TODDOPOLI UEBANGKE	734.276.624	293.710.650	293.710.650	146.855.325	401.02.02.01619-3
10	TANDOYONDO	742.492.330	296.996.932	296.996.932	148.498.466	401.02.02.01596-7
VIII	**KECAMATAN BUNGKU UTARA**					
1	BATURUBE	754.632.978	301.853.191	301.853.191	150.926.596	401.02.02.01552-7
2	POSANGKE	784.507.779	313.803.112	313.803.112	156.901.556	401.02.02.01579-7
3	TARONGGO	780.715.506	312.286.202	312.286.202	156.143.101	401.02.02.01597-9
4	UERURU	727.125.360	290.850.144	290.850.144	145.425.072	401.02.02.01610-5
5	UEWAJO	761.242.548	304.497.019	304.497.019	152.248.510	401.02.02.01609-1
6	TIRONGAN BAWAH	740.572.001	296.228.800	296.228.800	148.114.400	401.02.02.01598-0
7	TIRONGAN ATAS	762.065.349	304.826.140	304.826.140	152.413.070	401.02.02.01601-4
8	SILITI	751.409.956	300.563.982	300.563.982	150.281.991	401.02.02.01584-1
9	LEMO	742.833.759	297.133.504	297.133.504	148.566.752	401.02.02.01565-6
10	SALUBIRO	832.758.784	333.103.514	333.103.514	166.551.757	401.02.02.01582-6
11	UEMASI	752.388.651	300.955.460	300.955.460	150.477.730	401.02.02.01607-6
12	OPO	762.185.922	304.874.369	304.874.369	152.437.184	401.02.02.01600-2
13	TANAKURAYA	747.233.311	298.893.324	298.893.324	149.446.662	401.02.02.01592-9
14	TAMBAROBONE	744.121.015	297.648.406	297.648.406	148.824.203	401.02.02.01590-5

15	WOOMPARIGI	740.004.800	296.001.920	296.001.920	148.000.960	401.02.02.01612-9
16	BOBA	740.451.244	296.180.498	296.180.498	148.090.249	401.02.02.01554-0
17	KALOMBANG	746.009.622	298.403.849	298.403.849	149.201.924	401.02.02.01558-9
18	TOKONANAKA	746.906.931	298.762.772	298.762.772	149.381.386	401.02.02.01603-8
19	MATUBE	749.697.406	299.878.963	299.878.963	149.939.481	401.02.02.01570-9
20	LEMOWALIA	758.460.967	303.384.387	303.384.387	151.692.193	401.02.02.01613-0
21	UEMPANAPA	750.309.066	300.123.626	300.123.626	150.061.813	401.02.02.01621-1
22	TOKALA ATAS	776.302.650	310.521.060	310.521.060	155.260.530	401.02.02.01602-6
23	POKEANG	750.273.236	300.109.294	300.109.294	150.054.647	401.02.02.01615-5
IX	**KECAMATAN MAMOSALATO**					
1	PANDAUKE	781.643.830	312.657.532	312.657.532	156.328.766	401.02.02.01576-0
2	KOLO BAWAH	769.914.108	307.965.643	307.965.643	153.982.822	401.02.02.01599-3
3	BOBA	758.630.630	303.452.252	303.452.252	151.726.126	401.02.02.01561-8
4	MOMO	752.157.240	300.862.896	300.862.896	150.431.448	401.02.02.01573-5
5	TANANAGAYA	747.216.704	298.886.682	298.886.682	149.443.341	401.02.02.01593-0
6	UEPAKATU	755.021.887	302.008.755	302.008.755	151.004.377	401.02.02.01608-8
7	LIJO	746.093.449	298.437.380	298.437.380	149.218.690	401.02.02.01566-8
8	TANASUMPU	769.883.413	307.953.365	307.953.365	153.976.683	401.02.02.01594-3
9	PARANGISI	751.216.788	300.486.715	300.486.715	150.243.358	401.02.02.01577-3
10	GIRIMULYA	734.186.050	293.674.420	293.674.420	146.837.210	401.02.02.01556-5
11	WINANGOBINO	783.236.296	313.294.518	313.294.518	156.647.259	401.02.02.01611-7
12	TAMBALE	738.841.410	295.536.564	295.536.564	147.768.282	401.02.02.01589-1
13	SEA	779.222.498	311.688.999	311.688.999	155.844.500	401.02.02.01583-8
14	MENYO'E	792.930.179	317.172.072	317.172.072	158.586.036	401.02.02.01571-0
X	**KECAMATAN PETASIA BARAT**					
1	TIU	763.974.644	305.589.858	305.589.858	152.794.929	401.02.02.01547-4
2	TONTOWEA	758.988.483	303.595.393	303.595.393	151.797.697	401.02.02.01549-8

3	TOGO MULYO	756.944.059	302.777.623	302.777.623	151.388.812	401.02.02.01548-6
4	MARALEE	736.015.586	294.406.234	294.406.234	147.203.117	401.02.02.01537-0
5	MONDOWE	750.066.224	300.026.490	300.026.490	150.013.245	401.02.02.01541-2
6	SAMPALOWO	738.081.927	295.232.771	295.232.771	147.616.385	401.02.02.01581-4
7	MOLEONO	748.247.091	299.298.837	299.298.837	149.649.418	401.02.02.01539-5
8	ONEPUTE	750.761.135	300.304.454	300.304.454	150.152.227	401.02.02.01574-7
9	ULU LAA	738.643.527	295.457.411	295.457.411	147.728.705	401.02.02.01622-2
10	TADAKU JAYA	730.983.732	292.393.493	292.393.493	146.196.746	401.02.02.01618-0
	JUMLAH	**92.307.586.900**	**36.923.034.760**	**36.923.034.760**	**18.461.517.380**	

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

A. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa .....Kec. .....
Dalam rangka pelaksanaan alokasi Dana Desa (ADD), dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
3. Akan menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Akan menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa setelah menetapkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20...

Kepala Desa .....

Meterai
Rp. 10.000

(Nama Lengkap)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa .....Kec. .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya atas nama pemerintah Desa..... Kecamatan ..... penerima Alokasi Dana Desa (ADD), telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam APBDesa tersebut sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam APBDesa dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian keuangan tersebut ke kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan ras tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20...

Kepala Desa .....

Meterai
Rp. 10.000

(Nama Lengkap)

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI